

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial dan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia yang sampai saat ini masih dicari solusinya adalah kemiskinan. Menurut Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang bekerja sama dengan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), pada bulan September 2018, sebanyak 1.3 miliar masyarakat dunia terdeteksi sebagai masyarakat miskin. Pada tingkat nasional, negara Indonesia mengalami tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 1999 dengan persentase sebanyak 23,43%. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat masyarakat miskin di negara ini mencapai 25,95 juta orang dengan persentase sebesar 9,82% pada tahun 2018. Kemiskinan memang suatu persoalan yang dihadapi oleh berbagai negara. Berbagai macam kebijakan sudah disusun oleh pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut dari segi sektoral, moneter, fiskal, ataupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan-kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan (Pratama, 2015).

Menurut data Sakernas 1976, ditemukan bahwa sebanyak 81,36 penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan hanya 18,64% yang tinggal di daerah perkotaan. Kegiatan ekonomi pedesaan pada dasarnya adalah kehidupan yang seadanya yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya setempat (Sukidjo, 1995). Wilayah pedesaan memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang relatif banyak dan tenaga kerja yang murah. Hal tersebut seharusnya merupakan faktor pendukung bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi desa tak jarang dipandang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan (Anggraeni, 2016). Selama ini, kemiskinan di pedesaan juga dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi asli desa contohnya yang akhirnya mengakibatkan keterbelakangan ekonomi dan kemiskinan di pedesaan padahal desa adalah pusat dari perekonomian bangsa di mana seharusnya pembangunan diawali dari tahap bawah yakni dilakukannya pembangunan desa. Pada saat ini, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan desa dengan menyalurkan dana yang cukup besar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pati dan Sekitarnya, 2019

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pati	119,00	9,46	1,47	0,31	423 922
Grobogan	161,90	11,77	1,53	0,13	375 521
Blora	97,90	11,32	0,90	0,34	335 837
Rembang	95,30	14,95	2,32	0,48	384 561
Kudus	58,00	6,68	0,83	0,17	406 470
Jepara	83,50	6,66	0,64	0,10	386 693
Jawa Tengah	3 743,23	10,80	1,53	0,30	369 385

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pati dan Sekitarnya Tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

Kabupaten Pati ialah salah satu daerah yang berasal 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, pada sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, serta pada sebelah timur berbatasan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Pada kawasan Kabupaten Pati dan sekitarnya dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ialah Kabupaten Grobogan sebesar 161, 90 ribu jiwa yang setelah itu disusul oleh Kabupaten Pati di posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 119,00 ribu jiwa. Padahal Kabupaten Pati memiliki potensi-potensi yang bisa ditingkatkan seperti contohnya sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki 401 desa yang mana lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan yang hanya memiliki 273 desa. Potensi-potensi yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Pati seharusnya bisa dikembangkan sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati dan nantinya dapat menjadikan Kabupaten Pati berada di posisi terbawah dalam hal banyaknya kemiskinan di wilayah sekitarnya tersebut.

Pertumbuhan ekonomi desa di mana merupakan tahap awal pembangunan nasional dapat ditingkatkan dengan melalui dua pendekatan yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan upaya perubahan dan melakukan pencegahan terhadap sesuatu yang tak diinginkan dan *political will* dan kemampuan pemdes bersama masyarakat desa dalam menerapkan perencanaan pembangunan yang telah disusun (Angraeni, 2016). Upaya yang dapat ditempuh salah satunya ialah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang mana kewirausahaan desa menjadi langkah dalam pengembangann kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan desa ini dapat dikumpulkan di suatu wadah yaitu dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah atau masyarakat desa (Prabowo, 2014). Kewirausahaan desa inilah yang dapat diwadahi dalam suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat desa dengan cara pengikutsertaan secara langsung yang awal mulanya dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk pengelolaan asset, jasa pelayanan, dan usaha-usaha lain guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberi kesempatan pelayanan usaha antar desa yang mana dalam pelayanan usaha antar desa bisa didirikan BUMDesma. Sementara itu, BUMDesma merupakan suatu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh lebih dari satu desa dan dilakukan secara bersama-sama. Pembentukan BUMDesma dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, peleburan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diisinyalir dapat menjadi titik pertama dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pedesaan dan menjalankan serta mengembangkan unit usaha desa dikarenakan perekonomian pedesaan merupakan poros utama untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang maju. Pendirian BUMDes diyakini bisa memacu gerak roda perekonomian yang ada di desa serta bisa mewujudkan perekonomian yang merata dengan terbentuknya unit-unit usaha di desa (Alkadafi, 2014).

Desa sebagai suatu unit paling kecil dari negara secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Negara Indonesia mempunyai 74.093 desa (BPS, 2013) dan lebih dari 32.000 desa masih masuk ke dalam kategori desa tertinggal. Salah satu upaya guna mengatasi hal tersebut ialah menciptakan kewirausahaan desa di mana sumber daya dan potensi desa yang disediakan secara langsung oleh masyarakat desa guna mengubah keadaan sosial di wilayah desa. Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan

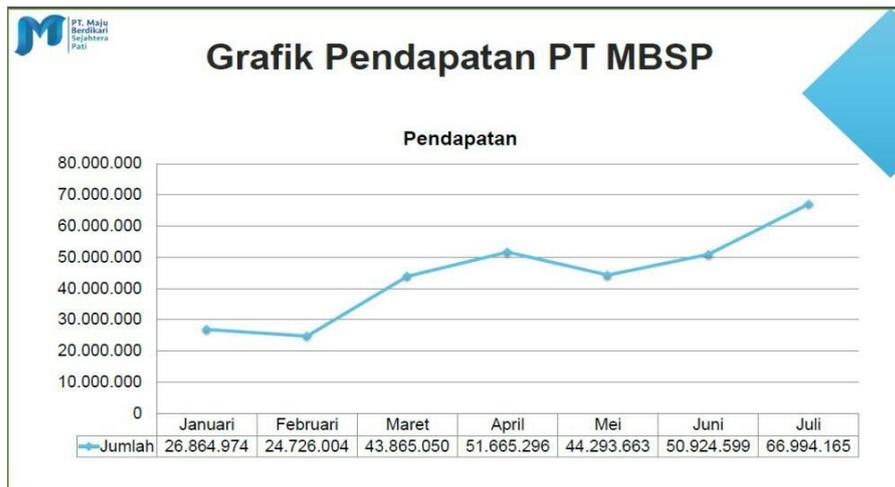
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memberi kesempatan luas terciptanya desa yang mandiri dan otonom dalam mengatur sumber daya desa di mana BUMDes memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi desa. Namun, dalam kenyataannya desa mempunyai keterbatasan yaitu modal sosial desa besar dibanding modal ekonomi di mana modal sosial ini ialah ikatan sosial, jaringan sosial, dan jembatan sosial. Modal sosial tersebut masih sifatnya terbatas dan tidak mampu memfasilitasi upaya pertumbuhan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pati telah ada sejak tahun 2014, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Kemudian, semakin lama jumlah tersebut makin bertambah dan mulai tahun 2019. Pada kenyataannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Pati hanya mendirikan unit usaha simpan pinjam padahal dalam pelaksanaannya usaha ini seringkali terbengkalai terutama dibelit oleh kredit macet. Kemudian, muncul gagasan untuk membuat usaha dengan melihat potensi desa secara lebih kreatif yakni dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Gagasan tersebut muncul ketika musyawarah yang dihadiri oleh Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).

Pada awalnya, gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) ditujukan bagi seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Pati, akan tetapi tidak semua desa berminat untuk bergabung dan hanya ada 159 desa yang sepakat untuk membentuk BUMDesma dari jumlah total 401 desa yang ada di Kabupaten Pati. Selanjutnya, setiap desa menyumbangkan dana yang digunakan sebagai modal awal pendirian. Sebagian besar menyumbangkan modal sebesar Rp 20.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 berdasarkan dengan kemampuan masing-masing desa. Modal awal yang terkumpul yaitu sebesar Rp 5.050.000.000,00 dan dari sanalah pada tanggal 20 Juli 2018 terbentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang dinamai BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati.

Tujuan didirikannya BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati adalah sebagai penggerak tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan Pati yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya, pemanfaatan dan pengoptimalan kekayaan desa guna kesejahteraan desa, pengembangan usaha-usaha masyarakat pedesaan dalam mengelola potensi yang ada di desa, peningkatan perencanaan kerjasama usaha yang ada di desa dengan pihak ketiga, upaya mewujudkan kesempatan dan relasi pasar yang memotivasi kebutuhan pelayanan masyarakat pedesaan, pengembangan kualitas pelayanan dasar pedesaan, pewujudan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan serta pendapatan asli desa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati.

Dalam upaya pengelolaannya, BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati membentuk sebuah Perusahaan Terbatas (PT). Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam hal menjalin kerja sama dengan pihak ketiga karena telah berbadan hukum dan juga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga terbentuklah PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati (PT. MBSP). PT. MBSP inilah yang nantinya melahirkan unit usaha Klinik BUMDes Sehat, BUMDes Co-Working Space, dan PT. Mitra Desa Pati (PT MDP). Penentuan unit-unit usaha yang dijalankan didasarkan pada data kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pati. Separuh dari modal awal dari BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati disalurkan untuk pembangunan unit usaha Klinik BUMDes Sehat di mana klinik ini adalah unit usaha utama dari BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati. Dalam menjalankan roda organisasinya, BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dananya berasal dari APBDes, bantuan dari pemerintah yang masuk dalam APBDes dan hibah atau bantuan dari pihak ketiga.



Tabel 2. Pendapatan PT. MBSP

Sumber : Company Profile PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati Bulan Juli 2020

Sepanjang tahun 2020 yaitu mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, pendapatan dari PT. MBSP (Maju Berdikari Sejahtera Pati) mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan mulai dari Rp 26.864.974,00 di bulan Januari 2020 hingga sebesar Rp 66.994.165,00 di bulan Juli 2020. Namun, secara rata-rata dan keseluruhan, PT. MBSP (Maju Berdikari Sejahtera Pati) mengalami kenaikan pendapatan.

Klinik Bumdes	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Trangkil	473	475	497	741	732
Pati	324	385	612	967	1.143
Tlogowungu	262	270	269	767	1.170
Wedarijaksa	381	380	657	653	648
Margoyoso	0	0	0	0	4
JUMLAH	1.440	1.510	2.035	3.128	3.697

Tabel 3. Penambahan Peserta BPJS Tahun 2020

Sumber : RUPS Tahunan PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati Tahun 2020

Sementara itu, untuk Klinik Pratama BUMDes Sehat yang merupakan salah satu lini usaha andalan dari BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati mulai tahun 2020 telah mengalami peningkatan jumlah pasien peserta BPJS mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Peningkatan jumlah pasien peserta BPJS meningkat di seluruh cabang dari Klinik Pratama BUMDes Sehat tersebut yaitu yang ada di Kecamatan Pati, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Margoyoso.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka hal yang menarik untuk diteliti dan menjadi rumusan masalah, yaitu “Bagaimana pengelolaan BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dalam perspektif *good governance*?”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati dalam perspektif *good governance*.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis harapkan dapat dijadikan sumber rujukan, referensi, dan informasi bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan supaya menambah sumber informasi dan sebagai pembanding bagi penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian yang lain. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pegangan dan sumber referensi bagi penelitian yang sedang dilaksanakan sehingga nantinya akan memperoleh berbagai kajian teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis.

Berdasar pada penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian sejenis dengan judul yang sama dengan penelitian yang penulis laksanakan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang terkait yang penulis pilih yang dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian penulis yaitu Yogi Subagio (2020) meneliti tentang keefektifan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang yang mencakup kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah teknik wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian tersebut mendapatkan hasil yaitu pada indikator kooperatif masyarakat sudah menjalankan dengan baik, pada indikator partisipatif masih minimnya sosialisasi pada masyarakat untuk turut dalam pengembangan usaha, pada indikator emansipatif keseluruhan berjalan baik meski masih kurangnya peran masyarakat dalam peningkatan pendapatan BUMDes. Sementara itu, pada indikator transparan, akuntabel, dan sustainable sudah berjalan dengan baik.

Penelitian milik Juliman dan Amra Muslimin (2019) yang diberi judul “Optimalisasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa”. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data memakai model analisis interaktif.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilihat dari segi sumber daya manusia dalam upaya memberi pelayanan pada masyarakat dan peran dari pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Dalam penelitiannya ini disebutkan jika masih belum maksimalnya tata kelola BUMDesa sehingga belum bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Ahmad Nur Ihsan (2018) juga melaksanakan penelitian mengenai tahapan mengelola BUMDes yang berlokasi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Metode penelitian yang dipakai ialah metode deskriptif kualitatif di mana memakai teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak yang diisinyalir mampu memberi informasi terkait proses pengelolaan BUMDes dan juga dokumentasi hasil pengelolaan BUMDes. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil bahwa BUMDes Gerbang Lentera pengelolaannya sudah baik meskipun masih terbilang baru. Prises tata kelola BUMDes sudah baik sejalan dengan tujuan didirikannya BUMDes dibuktikan dengan unit usaha yang juga berjalan baik. Namun, BUMDes ini masih kesulitan memperoleh pegawai karena masih sulitnya BUMDes memberikan gaji.

Penelitian lain yang berkaitan dengan BUMDes yang bisa penulis jadikan referensi ialah milik Nofa Safitri (2021) yng berjudul “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDes Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini berfokus pada strategi apa yang diimplementasikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes) Al-Falah di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan analisis

ekonomi islam terhadap strategi pengelolaan BUMDes tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian milik Nofa Safitri menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BUMDes Al-Falah telah menerapkan target dan tujuan yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling (pengawasan). Akan tetapi, pada analisis ekonomi islam pengelolaannya sebagian besar menggunakan konvensional.

Penelitian yang serupa dilaksanakan oleh Nofiratulillah (2018) yang meneliti tentang implementasi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan problem-problem BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini diberi judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen/data, dan foto. Penelitian milik Nofiratulillah menggambarkan bahwa eksistensi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa semakin mengalami peningkatan baik dari aspek pendapatan maupun segi pengelolaannya. Sementara itu, problem yang dihadapi adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes dan kurangnya sosialisasi terkait keberadaan BUMDes.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah mengenai objek penelitian, penelitian penulis menggunakan objek yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati yang berlokasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati karena BUMDesma tersebut sejauh ini memiliki unit usaha yaitu Klinik BUMDes Sehat dan Co-working Space di mana

merupakan yang pertama kali ada dan terobosan baru di Indonesia yang diusung oleh BUMDesma. Peneliti lebih menekankan pada analisis bagaimana inovasi dari BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati ini dalam perspektif *good governance*.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 *Good Governance* dalam Tata Kelola BUMDes

Menurut Sedarmayanti (2010:67) pengertian *good governance* adalah sistem yang memberikan peluang terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga hubungan yang membangun antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, *good governance* merupakan semuanya yang berkaitan dengan tindakan ataupun tingkah laku yang sifatnya mengendalikan, mengarahkan, maupun mempengaruhi persoalan publik guna menciptakan nilai-nilai itu pada kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, 2003). Implementasi *good governance* dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia menurut dokumen kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju pembangunan manusia berkelanjutan pada Januari 1997 yg dikutip dari bulletin informasi program kemitraan guna pembaruan tata pemerintahan di Indonesia (*Partnership for good governance reform in Indonesia*), 2000, tata pemerintahan ialah pemakaian kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur hal-hal dan urusan negara di masing-masing tingkat.

World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” yang berarti cara kekuasaan negara dipergunakan dalam mengelola ekonomi dan sumber daya sosial untuk pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP menggambarkan *governance* sebagai “*the exercise of political*

economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels”, yang mana pelaksanaan otoritas ekonomi politik dan administratif untk mengelola urusan negara di seluruh tingkatan. Pada kasus ini, World Bank lebih memfokuskan pada strategi pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi guna keperluan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih memfokuskan dari sisi ekonomi, politik dan administratif dalam tata kelola sebuah pemerintahan negara.

Good governance dianggap menjadi alternatif pelaksanaan pemerintahan potensi masingmasing *stakeholders* bisa direalisasikan dalam menanggulangi persoalan dan hambatan yang ada di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dapat berkembangnya kegiatan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, dan kemandirian daerah. Adapun, setidaknya ada beberapa prinsip ysng dinilai sebagai prinsip-prinsip utama yang mendasari *good governance*, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).

a. Akuntabilitas

Pemerintah sudah semestinya mmpu mempertanggung-jawabkan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan ysng diterapkan. Prinsip akuntabilitas juga berhubungan denganertanggungjawaban terhadap keefektifan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target dari kebijakan dan program.

b. Transparansi

Prinsip transparansi dapat diartikan ketika masyarakat dan sesama pegawai pemerintah sama-sama mrngetahui dan mendapatkan data dan informasi secara mudah dan akurat mengenai kebijakan, program, maupun kegiatan dari pemerintah di tingkat pusat atau daerah selama data dan informasi tersebut tak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dimufakati. Data dan informasi ysng berhubungan drngan tugas dan fungsi dari pemerintah (organisasi yang berkaitan dipaparkan dengan sebenar-benarnya. Selain itu, juga menghendaki terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mengemukakan kritik dan saran terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

c. Partisipasi

Tiap-tiap kebijakan yang ada di pemerintahan haruslah dilandasi dengan kesepakatan bersama masyarakat. Terdapat kritik dan saran oleh masyarakat untuk menciptakan kinerja pelayanan yang semakin baik. Selain itu, juga melibatkan masyarakat untuk bersosialisasi

Sementara itu, prinsip *good gvernance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) ialah sebagai berikut :

a. *Transparancy* (keterbukaan informasi)

Keterbukaan dan kemudahan akses informasi yang mencakup program ataupun kegiatan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara nyata.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Pertanggungjawaban dengan sebenar-benarnya oleh penyelenggara terhadap berbagai pihak yang terkena dampak kebijakan atas setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

c. *Responsibility* (tanggung jawab)

Kesesuaian dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga terhadap nilai-nilai korporasi yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Independency* (kemandirian)

Organisasi dikelola secara profesional dan tidak adanya gesekan antar kepentingan satu dengan yang lainnya, pengaruh dan tekanan dari pihak lain yang bertolak belakang dengan kebijakan dan peraturan yang ada.

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Pemberian perlakuan yang adil dan setara yang didasari aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak-hak dari pihak-pihak yang berkeperluan.

Ada beberapa prinsip mengenai *good governance* yang bisa ditemukan juga pada prinsip pengelolaan BUMDes. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, Badan Usaha Milik Desa atau yang kerap kali disebut BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dan didirikan berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah sebuah badan usaha yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat (Wiratna, 2019:7). Prinsip pengelolaan BUMDes menurut Wiratna (2019:31) adalah sebagai berikut :

a. Kooperatif

Seluruh elemen yang ikut serta dalam BUMDes harus mampu menjalankan kerjasama dengan baik guna pengembangan dan keberlangsungan unit usaha BUMDes.

b. Partisipatif

Seluruh elemen yang ikut serta dalam BUMDes harus siap dengan sukarela maupun diutus memberikan kontribusi guna mendorong usaha memajukan BUMDes. BUMDes memerlukan banyak ide, pikiran dan kontribusi nyata yang di mana dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk mendorong BUMDes supaya semakin maju.

c. Emansipatif

Seluruh elemen yang terlibat di dalam BUMDes harus mendapat perlakuan yang sama tidak membedakan antar suku atau agama dan tidak membedakan latar belakang manapun.

d. Transparan

Kegiatan yang memiliki pengaruh pada kepentingan masyarakat umum haruslah dapat mudah dan terbuka diketahui oleh seluruh masyarakat.

e. Akuntabel

Kegiatan dari unit usaha harus dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

f. *Sustainable*

Kegiatan BUMDes harus ditingkatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan didirikan BUMDes yaitu pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat dilihat jika prinsip pengelolaan BUMDes memiliki beberapa persamaan indikator dengan teori *good governance* yaitu pada indikator akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ketiga indikator tersebut memiliki kesamaan dengan teori *good governance* dari Dr. Sedarmayanti di mana di dalamnya terdapat indikator akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sistem yang memberikan peluang adanya mekanisme pelaksanaan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan hubungan yang membangun antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. *Good governance* juga merupakan seluruh urusan yang berhubungan dengan tindakan maupun tingkah laku yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi persoalan publik guna menciptakan nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari. Prinsip dari tata kelola pemerintahan atau biasa disebut *good governance* paling tidak terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sementara itu, prinsip pengelolaan BUMDes memiliki beberapa persamaan indikator dengan teori *good governance* yaitu pada indikator akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ketiga indikator tersebut memiliki kesamaan dengan teori *good governance* dari Dr. Sedarmayanti di mana di dalamnya terdapat indikator akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Konsep	Indikator	Sub-Indikator
1. <i>Good Governance</i> (dalam tata kelola BUMDes)	Akuntabilitas : pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target dari kebijakan dan program.	- Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program - Adanya laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan BUMDes - Adanya mekanisme pelaporan yang jelas mengenai evaluasi

		<p>dan</p> <p>pertanggungjawaban</p> <p>dari kegiatan</p> <p>BUMDesma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya evaluasi terhadap keberjalanan unit usaha BUMDesma - Dilaksanakannya rapat koordinasi
	<p>Transparansi :</p> <p>masyarakat dan sesama pegawai pemerintah sama-sama mengetahui dan mendapatkan data dan informasi secara mudah dan akurat mengenai kebijakan, program, maupun kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses masyarakat terhadap informasi BUMDesma - BUMDesma menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat - BUMDesma menyediakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program dari BUMDesma

	Partisipasi : Setiap kebijakan dalam pemerintahan harus berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat dalam BUMDesma - Akses untuk menyampaikan kritik dan saran - Diselenggarakannya musyawarah bersama dengan perwakilan masyarakat.
--	--	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berarti data yang diperoleh bukan berwujud angka-angka akan tetapi berupa observasi, wawancara dan dokumen lain. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka data yang didapatkan sangatlah mendasar dikarenakan didasarkan pada fakta kejadian dan realitas. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya (Gunawan, 2015: 80).

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif di mana data deskriptif menggunakan data yang berupa teks. Pada metode kualitatif juga data yang didapatkan berasal dari orang pertama dan pengalaman langsung di mana data tak boleh didapatkan melalui pihak ketiga dan data tersebut harus benar-benar pengalaman langsung (Raco, 2010: 60). Maka dari itu, dengan menggunakan metode ini, penulis melaksanakan rangkaian tata cara pemecahan masalah dengan mendeskripsikan keadaan objek berdasarkan data dan fakta serta fenomena lalu dianalisis melalui cara deskriptif yang berupa kata-kata atau narasi.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian adalah hal yang penting pada penelitian kualitatif dikarenakan dengan ditentukannya lokasi penelitian hal ini berarti tujuan dan objek penelitian telah ditentukan sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Lokasi dalam penelitian penulis dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati dan Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati. Lokasi penelitian tersebut disesuaikan pula dengan keberadaan narasumber penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Muhammad Idrus ialah sebagai individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009: 91). Selain itu, subjek penelitian ialah sebuah individu atau sesuatu yang hendak dimintai keterangannya (Tatang, 1989). Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan 'orang dalam' pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi (Rahmadi, 2011: 62). Oleh karena itu, subjek penelitian adalah seorang individu atau kelompok yang bisa memberikan data-data yang

dibutuhkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Subjek penelitian pada kasus ini menjadi pemberi data atau informasi yang bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini ialah :

1. Ketua/Wakil Ketua BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati.
2. Direktur Utama PT. Maju Berdikari Sejahtera Pati.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian penulis ini adalah data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer adalah asal dari diperolehnya data secara langsung dengan pemberiannya pada yang mengumpulkan data tersebut (Sugiyono, 2008: 137). Data primer ini merupakan data yang penulis kumpulkan dan peroleh langsung dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan informan yang berada dalam struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder berfungsi sebagai asal muasal perolehan data yang dilaksanakan melalui membaca dan memahami berbagai sumber contohnya literatur, buku, artikel jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang mempunyai keterhubungan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan. Selain itu, bisa juga melalui surat kabar, situs lama resmi suatu instansi, dan lainnya (Sugiyono, 2008:137).

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008: 137).

1.8.5.1 Observasi

Pada lingkup penelitian, observasi didefinisikan sebagai prosedur melakukan pencatatan secara terstruktur terkait tindakan dengan melihat maupun mengamati tindakan individu maupun kelompok yang sedang diteliti secara langsung (Basrowi & Suwandi, 2008: 93-94). Observasi memiliki arti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010: 9). Oleh karena itu, teknik observasi dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dilaksanakan untuk mengobservasi dan mengamati segala hal yang dapat digunakan sebagai data dalam lingkup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mandiri Sejahtera Pati.

1.8.5.2 Wawancara

Dalam teknik wawancara terjadi komunikasi dari yang mewawancarai dan yang diwawancarai dengan interaksi secara langsung (Yusuf, 2014). Teknik wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang diwawancarai (Rahmadi, 2011: 75). Teknik wawancara bisa juga diartikan sebagai prosedur yang digunakan guna memperoleh data dengan menanyakan langsung secara tatap muka dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian (Rahmadi, 2011: 75). Pada penelitian penulis ini, penulis melaksanakan wawancara dengan narasumber- narasumber yang dimaksudkan untuk mendukung data penelitian. Adapun, pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kata yang asalnya dari kata “dokumen” yang memiliki makna barang tertulis. Maka dari itu, pengertian teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang telah ada. Adapun, dokumen mengenai seseorang atau kelompok orang, fenomena, atau kejadian pada kondisi sosial yang sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Dokumentasi berwujud kenyataan yang bisa berbentuk pesan, catatan diary, gambar, foto, hasil penemuan, oleh-oleh, kenangan, dan lain sebagainya. Informasi-informasi data berupa file yang bermanfaat bagi penelusuran data mengenai apa saja yang sudah terjadi. Selain itu, juga memfoto dan merekam percakapan wawancara guna mendorong kelengkapan data.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman, pada analisis data mempunyai 3 aliran aktivitas yang peristiwanya bersamaan yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Proses terjadinya bersamaan memiliki arti di mana antara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan menjadi suatu hal yang terhubung satu dengan yang lainnya (Ulber, 2009: 339).

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data ialah bagian dari tahapan analisis yang tujuannya mempertajam, melakukan klasifikasi, menyunting data yang tidak diperlukan dan supaya data menjadi terorganisir yang nantinya agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data adalah cara peneliti merangkum intisari data yang didapatkan dan

hanya berfokus pada sesuatu yang penting saja. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang dituju bukan saja sekadar penyederhanaan tetapi kepastian pengolahan data sebagai bagian yang mencakup pada lingkungannya (Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015).

1.8.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap sesudah melakukan reduksi data di mana penyajian data merupakan kegiatan yang mempunyai esensi sesudah mereduksi data pada jenis penelitian kualitatif. Tahap penyajian data berisi informasi-informasi dengan susunan dan ada kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan upaya pengelompokkan dan sajian data berdasarkan dasar permasalahan yang berawal dari kode tiap sub dasar masalah (Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015).

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan pengumpulan data sudah selesai, kemudian kesimpulan yang awal mulanya samar mengalami peningkatan di mana menjadi semakin rinci dan jelas. Lalu, hal terakhir yang harus dilaksanakan peneliti pada tahap ini yaitu menarik kesimpulan berdasar apa yang telah diperoleh sebelumnya.